Parletin Parla Par



Nomor 1247/IV/V/2023 • Mei 2023

3 Punya Kinerja Anggaran Terbaik, DPR Siap Terus Terapkan Transparansi 14 Jangan Sampai Institusi Negara Jadi Alat Kepentingan Penindas Warga





Kawal Haji 2023 yang Ramah Lansia & Peduli Antar Sesama



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily bersama Anggota DPR RI lainnya melepas para calon jemaah haji kloter 2 asal Cianjur di Bekasi, Jawa Barat.

akil Ketua Komisi
VIII DPR RI Ace
Hasan Syadzily
didampingi
oleh Anggota
Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid
mengingatkan para calon jemaah haji
untuk fokus dan menjaga konsentrasi
guna menyiapkan diri menuju puncak
haji di Armuzna (Arafah, Mudzalifah
dan Mina). Penyiapan diri ini penting
sebab puncak haji menuntut stamina
fisik yang prima.

"Jadi Bapak-bapak dan Ibuibu harus ingat bahwa nanti akan ada puncak haji yang memerlukan stamina yang prima. Jadi jangan sampai begitu sampai Mekkah langsung umrah berkali-kali tapi nanti pas puncak haji malah sakit," ujarnya saat melepas para calon jemaah haji kloter 2 asal Cianjur Jawa Barat di Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/5).

Karena itu pula, Ace yang juga Ketua DPP Golkar Jawa Barat ini berharap para jemaah haji tidak memaksan diri untuk kegiatan ibadah sebelum puncak haji. Itu karena ketahanan fisik perlu tetap dijaga



JAGA CITRA DAN NAMA BAIK INDONESIA, KARENA JAMAAH HAJI INDONESIA TERKENAL SANTUN, MURAH SENYUM DAN SABAR. sehingga pada saat puncak haji kondisi fisik masih memadai. "Puncak haji itu antara 8-12 Dzulhijah 1444 H, jadi harus dijaga," katanya.

Terlebih Ace juga menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kedutaan Arab Saudi ternyata cuaca di Mekkah bisa mencapai hampir 50 derajat celcius. Karena itu pula menjaga kondisi fisik menuju puncak haji menjadi sangat penting. "Jaga stamina, banyak minum agar tidak dehidrasi karena cuacanya sangat panas," ujarnya.

Ace juga menjelaskan bahwa jumlah calon jamaah haji lansia tahun ini mencapai 30 persen atau mencapai 65.879 orang. Itu berarti akan banyak kerjasama yang dibutuhkan untuk memastikan para lansia ini terjaga kesehatannya dan dapat menunaikan wukuf di Armuzna. "Tema ibadah tahun ini memang telah disesuaikan dengan jumlah lansia yang banyak, yakni Haji Ramah Lansia," kata Ace.

Acara pelepasan jamaah haji ini didampingi beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (Sihdu) Jaja Jaelani, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat Boy Hari Novian dan Kepala Asrama Haji Embarkasi Bekasi Aep Saepuzaman.

Di akhir sambutannya, Ace meminta para calon jemaah haji untuk menjaga citra dan nama baik Indonesia di mata internasional yang ikut dalam ibadah haji tahun ini di Arab Saudi. "Jaga citra dan nama baik Indonesia, karena jamaah haji Indonesia terkenal santun, murah senyum dan sabar," pungkas Ace.

man/aha





Punya Kinerja Anggaran Terbaik, **DPR Siap Terus** Terapkan Transparansi



Pimpinan DPR RI saat konferensi pers usai Rapat Paripurna.

PR RI masuk peringkat 5 besar kementerian/ lembaga yang memiliki Kineria Anggaran Terbaik Tahun 2022. Ketua DPR RI Puan Maharani pun memastikan siap membawa lembaga perwakilan tersebut menjadi lembaga yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Adapun penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). DPR RI mendapatkan penghargaan sebagai salah satu instansi dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 untuk kategori pagu sedang.

"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Kami bersyukur atas capaian ini. Penghargaan tersebut akan menjadi cambuk bagi DPR RI

untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan rakyat," kata Puan, Kamis (18/5).

Menurut Puan, penghargaan ini merupakan bukti DPR RI telah bekeria secara transparan. akuntabel, modern dan terbuka. Prinsip-prinsip tersebut merupakan visi misi yang dibawa Puan sejak awal ia menjadi Ketua DPR.

"Dan saya memastikan, DPR RI konsisten menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Ditambahkan Puan, DPR RI akan selalu meningkatkan kinerja dengan tata kelola keuangan yang akuntabel. Dengan begitu, DPR akan memberi manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia. --- aha



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANADr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media) Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

Andi Nufu Nauvai Kamadnina, A.Md. US

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Prattiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahnuli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulflikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

DESAIN GRAFISDito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL Muhamad Hendar Assifa S Kom Savant Rifni Hidavat S E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email: bag_penerbitan@dpr.go.id

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERM<u>intaan Hasil</u> CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Setuju KEM-PPKF 2024, F-PDIP Dorong Percepatan Transformasi Melalui Reformasi Struktural

raksi PDI-Perjuangan menyatakan persetujuan atas penyampaian pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih laniut. Melalui iuru bicara Masinton Pasaribu, Fraksi PDI-Perjuangan menegaskan persetujuan kerangka itu untuk dibahas lebih lanjut dan mendorong penguatan transformasi ekonomi.

Dalam pandangan F-PDIP, Masinton menilai pemerintah menetapkan arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan fiskal Pemerintah selama ini menempatkan Transformasi ekonomi bertumpu pada Reformasi Struktural. Konsolidasi Fiskal, dan Peningkatan Produktivitas.

"Oleh karena itu untuk mempercepat transformasi ekonomi maka diperlukan prakondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan produktivitas pemerintah yang meningkat," urai Masinton di Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, DPR RI Selasa (23/5).

Lebih lanjutnya, Masinto sampaikan asumsi ekonomi makro yang dirancang pemerintah, harus disertai dengan berbagai upaya dan kebijakan. Di antaranya adalah melalui kebijakan Pemerintah untuk menopang konsumsi rumah tangga dan kebijakan Pemerintah melalui program di Kementerian/Lembaga



Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu saat menyerahkan pandangan fraksinya atas KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2024.

terkait. Hal itu untuk meningkatkan produktivitas sektoral, sehingga dapat menambah nilai ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.

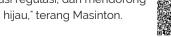
"Kebijakan Pemerintah bersama otoritas moneter untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil; melakukan upaya untuk dapat memitigasi dan mengantisipasi transmisi tekanan inflasi global ke domestik; Kebijakan dan upaya Pemerintah yang diarahkan pada pembangunan kedaulatan pangan. Lalu, Kebijakan dan upaya Pemerintah untuk membangun iklim investasi yang kondusif, yang dilakukan dengan target capaian terukur," sebut Masinton.

Menurut Anggota Komisi XI

DPR RI itu. Fraksi PDI-Periuangan mendorong pemerintah agar merancang arsitektur kebijakan Fiskal tahun 2024 dengan menempuh 2 (dua) strategi, yaitu Strategi Jangka Pendek dan Strategi Jangka Panjang.

"Strategi Jangka Pendek akan difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sedangkan Strategi Jangka Panjang akan difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber dava alam, reformasi kelembagaan, simplifikasi regulasi, dan mendorong ekonomi hijau," terang Masinton.

aha





Tanggapi KEM dan PPKF 2024, F-Partai Golkar Tekankan Reformasi Sektor Keuangan

raksi Partai Golkar DPR RI memandang tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yaitu, "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sangat tepat dalam menjawab segala tantangan yang ada. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Fraksi Partai Golkar menyatakan persetujuannya agar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2024 dapat dibahas lebih laniut.

"Guna mencapai target dan tujuan APBN 2024, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa pemerintah perlu terus melanjutkan dan memperkuat sejumlah agenda reformasi, seperti reformasi struktural, reformasi birokrasi, reformasi perpajakan, serta yang paling mutakhir adalah reformasi sektor keuangan," ujar Dave saat membacakan pandangan Fraksi Golkar atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun 2024, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Dari sisi indikator ekonomi makro, Fraksi Golkar berpandangan bahwa, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diusulkan pada kisaran 5.3 hingga 5.7 persen, target tersebut terbilang realistis mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terbaik dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*.

Fraksi Golkar, lanjutnya mengapresiasi optimisme pemerintah



Anggota DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat menyerahkan pandangan Fraksi Golkar atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun 2024.

mengusulkan target inflasi tahun 2024 pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. "Di tengah tren inflasi dunia yang diperkirakan masih relatif tinggi hingga 2024 mendatang, target tersebut perlu dicermati secara seksama. Terlebih, pada 2024 akan berlangsung pesta demokrasi Pemilu Serentak serta wacana kenaikan gaji ASN yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional," jelas Anggota Komisi I tersebut.

Kemudian, terhadap nilai tukar rupiah yang diproyeksi pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300, Fraksi Golkar mendukung pemerintah bersama Bank Indonesia meningkatkan kualitas pengelolaan devisa khususnya terkait regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar mampu berkontribusi optimal terhadap ketahanan kurs rupiah.

Lebih lanjut, dari sisi postur

RAPBN 2024, pendapatan negara pada APBN 2024 yang ditargetkan dalam kisaran 11,81 hingga 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan optimisme pemerintah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di tengah tingginya dinamika ekonomi global. Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan pagu indikatif belanja negara di kisaran 13,97 hingga 15,01 persen PDB.

"Angka-angka tersebut mencerminkan pengelolaan utang serta sustainabilitas APBN yang semakin membaik. Namun demikian, Fraksi Partai Golkar mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah beserta penjelasannya mengenai kekayaan negara yang dipisahkan berupa aset dan kewajiban BUMN dalam rapat-rapat selanjutnya," imbuhnya. • bia/aha

Nomor 1247/IV/V/2023 • Mei 2023



F-GERINDRA: Pemerintah Diharap Terus Mampu Jaga Tren

Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023

raksi Partai Gerindra (FGFRINDRA) DPR RI mengapresiasi capaian ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,31% dan triwulan I-2023 sebesar 5,03% (year on year/yoy) yang tercatat tetap tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Fraksi Partai Gerindra DPR RI berharap Pemerintah terus mampu menjaga tren pertumbuhan tersebut sehingga target di 2023 sebesar 5,3% dapat tercapai.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Jefry Romdonny saat mewakili Penyampaian Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPR RI atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senavan, Jakarta, Selasa (23/5).

"Dan untuk mencapai target pertumbuhan hingga sebesar 5,7% pada 2024, Fraksi Partai Gerindra DPR RI juga mendorong Pemerintah lebih serius melakukan revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian," ujar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Disisi lain. Fraksi Partai Gerindra DPR RI berpandangan Pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah agar tidak terpukul oleh tinggi inflasi, antara lain melalui penyaluran Perlinsos yang tepat sasaran dan tepat waktu. Sebagaimana diketahui, PDB Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yakni

sebesar 51,87% pada 2022. "Artinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi perlu dukungan penguatan konsumsi rumah tangga yang bisa menjadi salah satu penyebab tingginya inflasi," tuturnya.

Tak hanya itu, Fraksi Partai Gerindra DPR RI juga mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah bersama Bank Indonesia yang mampu menahan inflasi sehingga tidak melonjak tinggi sebagaimana yang dialami oleh beberapa negara maju. Pada 2022, papar Jefry, realisasi inflasi tercatat mencapai 5,51% yoy, lalu pada April 2023 tercatat menurun hingga 4,33% yoy.

"Untuk menjaga inflasi agar tidak melonjak tidak terkendali, Pemerintah perlu menjamin pasokan bahan pangan agar selalu tersedia di pasaran secara mencukupi mengingat selama ini komponen makanan menjadi salah satu pendorong peningkatan inflasi," tandas Jefry mewakili Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut.

Selanjutnya, mengenai target nilai tukar rupiah yang diusulkan pada rentang Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD, Fraksi Partai Gerindra DPR RI berharap nilai tukar rupiah bisa menguat lebih tinggi seiring dengan keberlanjutan penguatan kinerja ekspor dan surplus perdagangan vang sudah teriadi selama 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 hingga neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023.

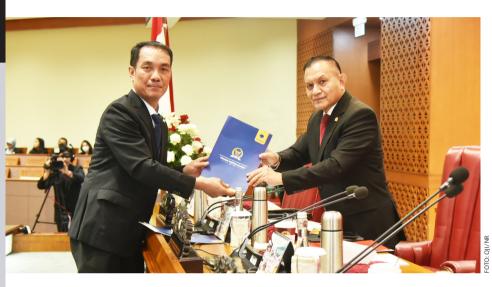
Selain itu, mengenai harga minyak mentah Indonesia yang diusulkan pada rentang USD75-85 per barel, Fraksi Partai Gerindra DPR RI berpandangan agar hal tersebut diikuti dengan penurunan harga BBM bersubsidi.



Anggota DPR RI Jefry Romdonny saat membacakan Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPR RI atas KEM dan PP RAPBN Tahun Anggaran 2024.



F-NASDEM: APBN 2024 Harus Jaga Pemulihan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat



Anggota DPR RI Fauzi H Amro saat menyerahkan Pandangan Fraksi Partai NasDem terhadap KEM PPKF RAPBN 2024 kepada Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus.

Amro menyampaikan Pandangan Fraksi Partai NasDem (FNASDEM) terhadap Keterangan Pemerintah atas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2024. Dalam kesempatan ini NasDem menekankan agar pada tahun anggaran ini pemerintah mampu memperkuat kontribusi permintaan domestik serta mempertahankan inflasi agar tetap berada pada level moderat. Menurutnya hal tersebut masih menjadi kunci dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

nggota DPR RI Fauzi H

"Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem memandang bahwa memperkuat kontribusi permintaan domestik serta mempertahankan inflasi agar tetap berada pada level moderat masih menjadi kunci dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat," papar Fauzi di ruang rapat paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Dia menjabarkan, arsitektur fiskal yang dirancang oleh pemerintah melalui Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 disusun dengan asumsi bahwa tren perlambatan ekonomi global masih akan terus berlangsung di tahun mendatang. Bahkan IMF meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya akan menyentuh level 2,8 persen.

"Sejumlah faktor seperti tingginya tingkat inflasi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter, semakin terbatasnya ruang kebijakan ekonomi baik fiskal maupun moneter serta meningkatnya tensi geopolitik menjadi risiko nyata yang harus terus diwaspadai," ungkap Fauzi.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% dan outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%. "Meskipun demikian, kita patut berbangga bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih terbilang cukup solid di tengah perlambatan ekonomi global tersebut," ujar Fauzi.

Lebih lanjut dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Fraksi Partai NasDem mempertanyakan dasar dan meminta penjelasan pemerintah terkait penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,7%. Menurutnya pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk mengangkat Indonesia dari Jurang Middle Income Trap sebelum tahun 2045. Untuk itu Fraksi Partai NasDem menganggap bahwa dibutuhkan upaya yang lebih keras melalui bauran kebijakan moneter dan fiskal untuk menyentuh angka pertumbuhan 6%.

Namun demikian pemerintah diharapkan mampu bekerja lebih keras terutama dalam meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB.
"Sebagaimana kita ketahui bersama meskipun secara nominal penerimaan negara terus mengalami peningkatan namun dari sisi rasio penerimaan negara terhadap PDB cenderung mengalami penurunan terutama rasio perpajakan," jelas Fauzi.

ssb/aha



F-PKB Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Realistis, Namun Terdapat Sejumlah Catatan

raksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI menilai target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3-5,7 persen yang ditetapkan Pemerintah cukup realistis. Meski demikian ada sejumlah catatan yang diberikan untuk pemerintah dalam bidang ekonomi. Apalagi melihat dinamika perekonomian global yang masih terus bergejolak dalam beberapa tahun terakhir dan belum meredanya ketegangan geopolitik berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

"FPKB berpendapat bahwa target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3-5,7 persen cukup realistis. Jika melihat geliat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021, 2022, dan awal 2023 menunjukkan tren positif dengan perbaikan di berbagai sektor, tentu menjadi pondasi yang baik pula dalam menata perekonomian di tahun 2024. Pemerintah harus terus menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Anggota Fraksi PKB DPR RI, Abdul Wahid, saat membacakan pandangan Fraksi PKB dalam sidang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Meski demikian, lanjut Wahid, FPKB mencatat bahwa peningkatan belanja infrastruktur belum meningkatkan Indeks Daya Saing dan kontribusi Industri dalam PDB (Produk Domestik Bruto). Maka dari itu, untuk meningkatkan investasi yang cenderung tertahan di tahun 2023 ini, FPKB mendorong agar pemerintah membuat skema yang menarik terhadap berbagai proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dijalankan, agar dapat menarik investor dan memberikan nilai tambah yang lebih bagi perekonomian, serta tidak menambah beban fiskal kedepannya.

Tidak hanya itu, dari sisi produksi, pemerintah harus terus mengoptimalkan kinerja di sektor pertanian, perdagangan dan Manufaktur guna menyerap tenaga kerja pasca pandemi. Sebagai kontribusi terbesar PDB, Industri manufaktur harus terus dijaga dan diperkuat agar memberikan multiplier effect yang di signifikan. Salah satunya adalah dengan penguatan teknologi yang efisien dan hilirisasi produk guna meningkatkan daya saing produk.

"Di sektor informasi dan komunikasi, pembangunan ekonomi digital Indonesia belum terlihat dengan jelas, padahal sektor ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan penggunaannya pada generasi milenial dan generasi Z di Indonesia yang masih masif. Peta jalan pembangunan ekonomi digital Indonesia baik antar kementerian maupun lembaga negara terkesan jalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dengan baik," tambahnya.



🕶 ayu/aha

Anggota Fraksi PKB DPR RI, Abdul Wahid, saat membacakan pandangan Fraksi PKB dalam sidang paripurna DPR RI.



Fraksi Partai Demokrat Tolak Subsidi Kendaraan Listrik

nggota DPR RI Rizki
Aulia Natakusumah
menyampaikan
pandangan Fraksi
Partai Demokrat
atas Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM
dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran
2024 dalam Rapat Paripurna ke24 Masa Sidang V Tahun Sidang
2022-2023. Dalam pandangan
fraksi itu disinggung soal kebijakan
subsidi kendaraan listrik. Ia menilai,
pemberian subsidi kendaraan listrik
tidak tepat.

Mengingat, subsidi untuk kendaraan listrik pribadi yang merasakan manfaatnya adalah pengusaha dan masyarakat yang mampu. "Pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontra produktif. karena seolah olah subsidi diberikan kepada pengusaha, bukan kepada rakyat miskin yang membutuhkan," ujar Rizki.

Alih-alih memberikan subsidi, Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah agar dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal. "Infrastruktur dasar listrik dan transportasi massal berbasis listrik perlu dibangun oleh Pemerintah untuk mendukung pergerakan masyarakat," katanya.

Fraksi Partai Demokrat juga meminta kepada pemerintah dalam penyusunan APBN 2024 untuk fokus pada pencapaian target RPJMN 2020-2024 dan menjadi momentum mendukung berbagai program pemberdayaan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting PEMBERIAN SUBSIDI UNTUK KENDARAAN LISTRIK PRIBADI JUSTRU KONTRA PRODUKTIF.

dan peningkatan layanan dan akses pendidikan serta kesehatan.

la mengatakan, APBN harus menjadi agen perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM Manusia Indonesia melalui perbaikan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan. Program perlinsos dan subsidi harus lebih ditekankan agar efisien, tepat sasaran dan responsif sehingga mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem. Perbaikan basis data penerima merupakan pekerjaan besar yang perlu dilakukan pemerintah.

Mengingat 2024 merupakan tahun politik, FPD memastikan agar pemerintah dapat tetap fokus untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas. Menurut Rizki, pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024. Rizki menekankan, kebijakan yang pro-growth (propertumbuhan), pro-poor (prokemiskinan), pro-environment (pro-lingkungan) dan pro-job (propenciptaan lapangan kerja) harus senantiasa menjadi rujukan dan dasar pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan.

"FPD akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan

kualitas SDM melalui



Anggota DPR RI Rizki Aulia Natakusumah saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.



F-PKS Ingatkan Penyusunan APBN 2024 Harus Memperhatikan Persiapan & Pelaksanaan Pemilu 2024

raksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menekankan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024 harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada di dalamnya. Sebab, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

"Dalam menyikapi Kerangka ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024, Fraksi PKS mengingatkan bahwa hasil pembahasan dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 akan meniadi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2024 sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada didalamnya," kata Andi Akmal Pasluddin saat membacakan pandangan FPKS dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pandangan fraksifraksi atas KEM-PPKF tahun 2024, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Transformasi Pembangunan Ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan pasca pandemi Covid-19 juga menjadi poin penekanan yang disampaikan Anggota Komisi IV itu. "Melalui mekanisme APBN, kita harus memastikan pencapaian dan



Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat menyerahkan pandangan FPKS dalam Rapat Paripurna DPR RI atas

target-target prioritas terkait dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat, terlebih lagi tahun 2024 adalah tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2025," katanya.

Fraksi PKS juga memberikan catatan penting lainnya, seperti per September 2022, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau 9,57% artinya masih jauh dari target 7%. Selanjutnya, resiko dari kemungkinan masalah akan timbul dengan semakin meningkatnya utang negara. Di sisi lain, dinamika pada tahun semakin berkualitasnya proses 2023, seperti masih berlangsungnya perang antara rusia-ukraina, kenaikan inflasi global, pengetatan kebijakan moneter global khususnya amerika Serikat, dan kondisi ekonomi yang menantang pada tahun 2024.

Selanjutnya, Legislator Dapil

Sulawesi Selatan II itu mengingat pada tahun 2024 adalah tahun politik, dimana negara akan menyelenggarakan perhelatan akbar pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Maka proses penyusunan APBN 2024 nanti haruslah juga memperhatikan persiapan dan pelaksanaan pemilu

"Kebijakan anggaran pada pembahasan APBN 2024 nanti diharapkan juga dapat mendorong dan memastikan penyelenggaraan demokrasi di negara kita. Secara umum pada pembahasan APBN 2024 nanti harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri," tegasnya



we/aha



F-PAN: Percepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif



Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo saat menyerahkan pandangan fraksinya atas KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2024.

nagota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, yang mewakili fraksi, Partai Amanat Nasional (FPAN), menyampaikan pandangan fraksi tersebut atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh pemerintah Jumat, (19/5) lalu. Fraksinya menyetujui kerangka itu untuk dibahas lebih lanjut dan mendorong penguatan transformasi ekonomi.

Eko mengawali membaca pandangan fraksinya dengan mengapresiasi Tema yang diambil pemerintah untuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 yaitu 'Mempercepat Tranformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan. Menurutnya, untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif diperlukan penciptaan struktur ekonomi yang produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu sektor tertentu, dan berkelanjutan.

"Dengan demikian, evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan yang sudah dan sedang berjalan mutlak dilaksanakan agar memberikan pijakan yang kokoh serta mampu mendorong perbaikan ekonomi secara menyeluruh," katanya di rapat paripurna, Gedung Nusantara II. Selasa (23/5).

Eko juga mengungkapkan pandangan Fraksi PAN terhadap asumsi makro yang diajukan pemerintah sebesar 5,3 cukup realistis. la berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memajukan UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan. "Karenanya, hajatan pemilu 2024 diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai tahun politik tetapi juga menjadi momentum kebangkitan konsumsi dan investasi yang lebih produktif," ungkapnya.

Dalam upaya menekan tingkat inflasi, Fraksi PAN juga mendorong pemerintah untuk lebih gencar melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah sehingga tanggung jawab menjaga stabilitas harga pangan. "Menekan tingkat Inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan kementerian terkait saja tetapi juga dilakukan oleh semua pihak di daerah." tegasnya.

Pemerintah menargetkan pendapatan Negara tahun 2024 tumbuh sebesar 11,81 hingga 12,38 persen dari PDB. Merespon hal itu, Fraksi PAN akan mengawal langkah kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan dengan menjaga iklim investasi yang keberlanjutan bagi dunia usaha serta kelestarian lingkungan.

Terakhir, pihaknya (Fraksi PAN) mendorong agar pelaksanaan perlindungan sosial dan pemberian dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program antara Kementerian dan Lembaga terkait.

nm/aha



F-PPP: Pemerintah Ambisius

Tetapkan Target Penerimaan Pajak di 2024



Anggota DPR RI Muhammad Aras saat menyerahkan pandangan fraksinya kepada Wakil Ketua DPR RI Lodewijk

raksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI menegaskan pemerintah cukup ambisius dalam menetapkan target penerimaan dari perpajakan pada tahun 2024. Yaitu, sebesar 9,91 persen hingga 10,18 persen dari PDB atau sekitar Rp2.280,3 triliun hingga Rp2.355,8 triliun. Hal itu mengingat masih tingginya dinamika ekonomi dan risiko ketidakpastian dalam negeri, terutama risiko akibat adanya pemilu atau pergantian kepemimpinan nasional.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP Muhammad Aras yang membacakan pandangan fraksi penyampaian pemerintah terhadap

BAGAIMANA PUN JUGA. SECARA HISTORIS. KONDISI EKONOMI PADA TAHUN TRANSISI KEPEMIMPINAN ATAU **PASCA PEMILIHAN** PRESIDEN SERINGKALI MELEMAH KARENA AKSI WAIT AND SEE PARA PELAKU USAHA.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

"Bagaimana pun juga, secara historis, kondisi ekonomi pada tahun transisi kepemimpinan atau pasca pemilihan presiden seringkali melemah karena aksi wait and see para pelaku usaha. Pelaku usaha, yang menjadi salah satu penyumbang utama penerima perpaiakan, umumnya baru akan melakukan ekspansi atau mengakselerasi aktivitas usahanya ketika kabinet baru telah tersusun," uiar Muhammad Aras di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa

Sebelumnya, pemerintah beralasan bahwa kenaikan target pajak tersebut disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya melalui optimalisasi perluasan basis, melaksanakan ekstensifikasi dan pengawasan secara kewilayahan, serta menvusun daftar sasaran prioritas pengamanan penerimaan pajak (DSP4) dengan prioritas pengawasan pada wajib pajak HWI, wajib pajak grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital.

Selanjutnya, pemerintah juga akan mengimplementasikan coretax administration system dengan menekankan pada perbaikan layanan perpajakan, pengelolaan data berbasis risiko, dan interoperabilitas data pihak ketiga; kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan dan mendorong pemanfaatan digital forensics: dan pemberian insentif pajak yang terarah dan terukur guna mendorong pertumbuhan sektor tertentu. -rdn





Guspardi Gaus: Perlu Ada Penyesuaian Kenaikan Gaji PNS

nggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi dan menyambut positif wacana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas tentang kenaikan gaji PNS yang disampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023. Menurut Guspardi, PNS di Indonesia sudah lama gajinya tidak naik, kenaikan gaji terakhir diterima para PNS sebagai abdi negara adalah pada 2019.

"Artinya, sudah empat tahun berturut-turut PNS tidak merasakan kenaikan gaji. Padahal di satu sisi, harga barang-barang naik, inflasi iuga demikian. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian," kata Guspardi saat ditemui Parlementaria di Senayan,

apa yang diusulkan MenPAN RB terhadap kenaikan gaji ASN tersebut," ielas Politisi Fraksi PAN ini.

Guspardi juga meyakini MenPAN-RB sudah melakukan kajian mengenai kesejahteraan para PNS dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun, lanjut Guspardi, berapa persen kenaikan gaji PNS yang diusulkan, tentu masih diperlukan kajian yang lebih komprehensif dan kenaikan gaji PNS dapat diimplementasikan mulai jabatan paling rendah hingga paling tinggi agar disamaratakan.

"Jangan sampai yang menikmati itu hanya pejabat-pejabat yang lebih tinggi jabatannya," ingat Anggota Baleg DPR RI ini.

Dengan kenaikan gaji PNS ini, pemerintah harus memastikan PNS lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. "Jangan ada lagi mental ingin dilayani, tindakan pungli, mark-up anggaran, hingga tindakan memperlambat birokrasi. Semua mesti merujuk pada desain besar Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah," tegas Guspardi.

Oleh karena itu, penerapan sistem reward and punishment harus secara konsisten dijalankan dengan tegas dan jelas. "MenPAN-RB tentunya tidak *ujug-ujug* mengajukan usulan kenaikan gaji PNS, di mana besaran serta mekanisme peningkatan kesejahteraan PNS itu masih harus digodok bersama Kemenkeu untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Yang lebih penting lagi agar masyarakat tidak mengaitkan usul kenaikan gaji PNS dengan Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung," tutupnya. 🗫 we/aha



Jangan Sampai Institusi Negara Jadi Alat Kepentingan Penindas Warga

akil Ketua
Komisi III DPR
RI Desmond
Junaidi Mahesa
menegaskan agar
kepolisian jangan sampai menjadi
alat kepentingan yang tidak benar.
Pernyataan tersebut diungkapkan saat
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi
III dengan Kapolda Metro Jaya dan
Jajaran, membahas permasalahan
sengketa kepengurusan Apartemen
Graha Cempaka Mas (GCM).

Rapat ini sebagai tanggapan kisruh warga apartemen Graha Cempaka Mas, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan Pengelolanya yaitu PT Duta Pertiwi Tbk. "Jangan sampai institusi negara dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang nggak benar. Bagi kami bicara tentang institusi kepolisian dibilang state-terrorism, ini bukan kalimat biasa. Ini kalimat yang merusak institusi kepolisian, kami jaga ini," tandas Desmond saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Ketegasan yang Desmond ungkapkan ini semata-mata untuk menjaga institusi kepolisian agar senantiasa menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan batasbatas yang melindungi warga negara. Dia menyampaikan kepada Kapolda Metro Jaya agar tetap menjalankan tugas keamanan dan ketertiban, jika tidak ada unsur pidana maka tidak perlu ikut campur.

"Bagi kami Komisi III, tidak mau institusi kepolisian menjadi alat, kami jaga ini. Kalau sampai polisi dianggap



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

state-terrorism, benarkah polisi menjadi state-terrorism? ini yang harus digali, makanya saya tegas, mana ada pidananya. Kalau gak ada pidananya gak usah ikut campur pak Kapolda. Kamtibmas tetap dilakukan, melanggar hukum, tegakan, siapa aja, ini negara hukum kok," papar Desmond.

Sebelumnya saat RDP Komisi
III, pada awal bulan lalu yang
memanggil Saurip Kadi sebagai
perwakilan dari pemilik dan
penghuni apartemen, mengharapkan
Komisi III memberikan perlindungan
hukum bagi pemilik dan penghuni
apartemen Graha Cempaka Mas
Jakarta Pusat. Menurutnya ada

permasalahan keperdataan antara warga dengan pengelola, bahkan menurutnya PT Duta Pertiwi menggunakan alat negara untuk mengintimidasi warga.

Lantas dia menjelaskan sembari memaparkan foto-foto bukti adanya campur tangan aparat yang membeking pengelola. Di kesempatan yang sama Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman, meminta agar para penghuni kompak agar tidak tertindas. Menurutnya ini merupakan bukti rakyat kecil yang tertindas. "Ini salah satu indikasi, contoh hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas," tegasnya.

ssb/aha





ABS: Polisi RW Harus Hati-Hati Jalankan Tugas

nggota Komisi III DPR RI Agung Budi Santoso (ABS) memberikan apresiasi sepenuhnya dengan inovasi kebijakan dari Polri yang menghadirkan Polisi RW. Menurutnya, kehadiran Polisi RW yang berada di luar struktur Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dapat langsung teriun ke masvarakat.

ARTINYA, JANGAN SAMPALTER JADI PENYELEWENGAN YANG JUSTRU MENCORENG NAMA POLRI DI MASYARAKAT. sampai terjadi penyelewengan yang justru mencoreng nama Polri di masyarakat," jelas Agung dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria. Kamis (18/5).

Menurut Politisi Fraksi Partai Demokrat itu Polisi RW ini akan sering berhubungan dengan masyarakat. Jadi, tegasnya, para polisi ini harus betul-betul bisa menjaga marwah Polri. "Jangan justru mencoreng reputasi Polri yang saat ini tengah membaik. Bravo-bravo Polri!," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran buka suara membeberkan program Polisi RW untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Dia mengatakan penerapan Polisi RW secara nasional itu merupakan instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

> "Untuk Polisi RW sudah menjadi perintah dan

> > kebijaksanaan Bapak Kapolri untuk kita terapkan secara bertahap di seluruh Indonesia," kata Fadil usai Apel Pembentukan dan Pelantikan Polisi RW (Polisi Jaga Warga) di lapangan Balai Kota Yogyakarta, Rabu (17/5).

Fadil menyebut seluruh Polda telah memiliki proyek pilot untuk program Polisi RW ini. Standarisasi diberlakukan ketika program ini telah menemukan bentuk atau modelnya.

-rdn



Ansy Lema Minta Pemerintah Serius Urus Vaksin Demam Babi **Afrika**

nagota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mendorona Kementerian Pertanian. khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk serius mengurus Vaksin African Swine Fever (ASF) atau Demam Babi Afrika. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan hingga saat ini keampuhan serum yang dikembangkan belum bisa mencapai angka di atas 80 persen, bahkan keampuhannya saat uji coba masih sekitar 40 persen.

"Yang pertama betul bahwa belum ada vaksin, tetapi hari-hari ini sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah mengembangkan serum sudah dilakukan beberapa kali uji coba, tetapi serum ini kesahihannya, keampuhannya, itu belum bisa mencapai angka di atas 80 persen. bahkan uji coba ini masih jauh di bawah itu hanya sekitar 40 persen," jelasnya saat ditemui Parlementaria, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, (19/5).

Ansy Lema sapaan akrabnya menjelaskan, ASF sudah terjadi di beberapa provinsi, termasuk di dapilnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diketahui, ASF juga menyebar hingga di Bali, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Untuk itu, ketersediaan vaksin ASF dirasa sangat penting untuk segera dilakukan.

"Karena bicara babi, ternak babi ini adalah ternak yang memiliki nilai ekonomis di satu sisi tetapi juga memiliki nilai kultural. Saya yakin

seperti bagi masyarakat di Toraja, di NTT, di Bali di Sumatera Utara. banyak sekali aktivitas-aktivitas kultural mulai dari kelahiran, ya acara-acara keagamaan perkawinan, dan pernikahan, bahkan sampai acara kematian, itu selalu melibatkan ternak yang namanya babi ini. Kalau persoalan penyakit mulut dan kuku yang menimpa sapi, republik ini ribut, mestinya urusan ASF ini juga harus ditangani secara serius," jelasnya.

Di sisi lain, Ansy Lema juga mengingatkan mengenai pentingnya menerapkan biosecurity. Menurutnya, setiap peternakan rakyat harus memiliki SOP (standard operational procedure) yang baik, dijalankan secara higienis, bersih, dan mempunyai

sistem pembuangan limbah yang jelas. "Karena kalau peternakan ini dijalankan tidak memenuhi standar SOP yang benar, maka kemudian yang terjadi ini adalah aspek biosecurity-nya tidak baik maka virus dan penyakit itu akan bisa menyerang babi dan kemudian mati," katanya.

Di akhir penyampaian, Ansy Lema juga meminta Menteri Pertanian harus segera turun untuk membereskan persoalan ini. "Setidaknya memberikan bantuan-bantuan secara cepat, turun membawa misalnya vitamin, desinfektan ya. Memisahkan ternakternak yang sakit, dengan pernah ternak yang masih sehat," tutupnya.

-we/rdn





Sudin Soroti Pentingnya Kesehatan Hewan Ternak di DIY

etua Komisi IV DPR RI Sudin menyoroti pentinanya kesehatan hewan ternak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan aman untuk dikonsumsi. Hal itu tersebut ia sampaikan usai memimpin Tim Kuniungan Keria Reses Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates. Kabupaten Kulon Progo, DIY, Jumat, (12/5).

"Hari ini kita mengunjungi Balai Besar Veteriner di Wates. Kita lihat tadi terdapat keluhan dari para peternak di balai tersebut yang mengatakan bahwa adanya permasalahan pada peralatan yang sudah berusia cukup tua," ungkap Sudin.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) itu pun menjelaskan bahwa peralatan yang dimiliki oleh BBVet Wates sudah ada dari tahun 2015. Sedangkan menurutnya, saat ini teknologi sudah semakin canggih dan cepat berkembang, dan jika ingin cepat mendeteksi berbagai macam penyakit pada hewan, peralatan harus bersih dan sesuai dengan standar yang ada.

"Tadi dikatakan oleh pihak BBVet membutuhkan kurang lebih kalau peralatan saia 5 Milyar, untuk bangunannya 5 Milyar. Maka tadi saya katakan juga, sebetulnya tidak perlu menggunakan yang baru,



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Tim Kunres Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veterinir (BBVet) Wates.Kunres Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veterinir (BBVet) Wates



HARI INI KITA **MENGUNJUNGI BALAI** BESAR VETERINER DI WATES, KITA LIHAT TADI TERDAPAT KELUHAN DARI PARA PETERNAK DI **BALAI TERSEBUT** YANG MENGATAKAN **BAHWA ADANYA PERMASALAHAN** PADA PERALATAN YANG SUDAH BERUSIA CUKUP TUA.

tapi bangunan yang lama juga tidak masalah yang penting dapat memenuhi standar untuk kesehatannya," ucap politisi daerah pemilihan (dapil) Lampung I itu.

Di samping itu, adanya pula komitmen Pemerintah untuk meningkatkan populasi ternak, dengan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan yaitu menjaga kesehatan hewan ternak dari penyakit.

"Karenanya, kunjungan kami (Komisi IV DPR RI) kesini (BBVet Wates) sebagai sarana untuk menjaring aspirasi serta mencari solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh para peternak di Kulon Progo," tegas Sudin. hnm/rdn



Pemerintah Didesak Evaluasi Tumpang Tindih Kewenangan Antar Kementerian di Desa

nggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi regulasi kewenangan di desa yang hingga saat ini dinilai masih tumpang tindih antar Kementerian/Lembaga. Terkait hal itu. Survadi menegaskan Komisi V DPR RI siap melakukan langkahlangkah revisi Undang-Undang (UU) dalam menentukan satu pintu pihak Kementerian/Lembaga yang paling berhak dalam melakukan pembinaan ke desa

Demikian disampaikan Politisi Fraksi PKS ini saat diwawancarai Parlementaria usai menerima kunjungan audiensi Forum Kepala Desa Kecamatan Narmada-Lingsar (For-Darling) Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).

"Ya memang sampai saat ini itu yang menjadi masalah, karena Kementerian/Lembaga ada Kementerian Desa selaku Pembina Pemerintah Desa, lalu ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan dan Kementerian lain sering tumpang tindih. Nah ini yang ingin kita atur kita revisi UU Desa supaya siapa sebenarnya yang berhak melakukan pembinaan ke desa," ujar Suryadi.

Suryadi mengungkapkan, salah satu contoh dari tumpang tindih kewenangan antar Kementerian tersebut yaitu masih adanya Kementerian yang hingga hari ini memberikan berbagai target dan beban program namun tidak diimbangi pemberian anggaran. "Bahkan, dana desa yang memang sudah kecil terpaksa digunakan untuk membikin kegiatan-kegiatan yang sebetulnya itu bukan kewenangan desa. Nah ini yang akan kita evaluasi. Kalaupun ada target untuk desa, ya harus selain diberikan target juga diberikan anggaran," tegasnya.

Oleh karena itu, Suryadi menuturkan kedepannya Komisi V DPR RI akan membuat regulasi agar desa diberikan kewenangan independensi yang lebih untuk mengatur dana desa dengan program-program yang sesuai kebutuhan di desa. "Yang penting nanti pertanggungjawabannya yang kita atur. Jadi bukan perencanaannya yang diintervensi tapi

supaya menghindari penyimpanganpenyimpangan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Anggota Komisi V DPR RI menerima kunjungan audiensi Forum Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Barat khususnya di Kecamatan Narmada-Lingsar yang dihadiri oleh segenap Kepala Desa, Kepala BPD dan perwakilan PKK dalam rangka menyampaikan aspirasi untuk peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa (Pemdes). Aspirasi tersebut diantaranya sorotan beberapa kelemahan dari UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 terkait kewenangan Kepala Desa dan pengelolaan keuangan desa.

pun/aha pertanggungjawabannya yang kita atur Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.

OTO: ARIEF/NR



Rahmad Handoyo Apresiasi Kinerja Pemda Kab. Kendal Lindungi Pekerja Migran

nggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handovo mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upayanya memberikan perlindungan terhadap para Pekeria Migran Indonesia (PMI) asal daerahnya.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Kendal dalam melindungi PMI, benar-benar perhatian yang luar biasa," ujar Rahmad usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (24/5)

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mengapresiasi minimnya angka terjadinya kasus seperti PMI yang berangkat secara ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) vana teriadi, ditengah tingginya angka penempatan PMI dari Kabupaten Kendal.

"Minimnya jumlah kasus PMI dari Kabupaten Kendal juga patut kita apresiasi, Semoga diberikan kekuatan yang sangat mumpuni, dalam rangka untuk mengemban tugasnya yang sudah sangat baik,"

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Kendal berada di urutan ke-12 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan angka penempatan PMI tertinggi dan menjadi urutan kedua di Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut dikatakan Bupati Kendal Dico M Ganinduto, saat menyampaikan paparan terhadap



MINIMNYA JUMLAH KASUS PMI DARI KABUPATEN KENDAL **JUGA PATUT** KITA APRESIASI. SEMOGA DIBERIKAN **KEKUATAN YANG** SANGAT MUMPUNI. **DALAM RANGKA UNTUK MENGEMBAN TUGASNYA YANG** SUDAH SANGAT BAIK. Anggota Komisi IX DPR RI dalam pertemuan tersebut.

Melihat hal itu, Rahmad menyatakan pihaknya mendorong pemerintah agar kedepannya dapat berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi calon PMI, sehingga mampu menjadi SDM yang terampil untuk mengisi peluang kerja di luar negeri.

"Masih banyak yang perlu ditingkatkan terutama kualitas SDM, terutama dalam kemampuan komunikasi dan bahasa. Untuk itu Komisi IX mendorong supaya kualifikasi PMI yang akan berangkat perlu diperhatikan," pungkas Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu. rr/aha



nggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Kendal, Jawa Tengah.



RUU Kesehatan akan Lahirkan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik



Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena foto bersama usai RDPU dengan Mahasiswa UI

etua Panitia Kerja (Pania) RUU Kesehatan **Emanuel Melkiades** Laka Lena mengatakan. Komisi IX DPR RI akan mengawal aspirasi dari seluruh pihak dalam pembahasan RUU Kesehatan. Aspirasi diperlukan untuk mewujudkan instrumen perlindungan dan kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat.

Hal itu dikatakan Melki usai RDPU dengan Mahasiswa UI Fakultas Kesehatan dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (23/5).

Melki kembali menegaskan bahwa pihaknya (Komisi IX) DPR selalu membuka ruang untuk

berdialog terkait muatan RUU tersebut. Dia meniamin bahwa Komisi IX DPR akan mengawal aspirasi dari seluruh pihak dalam pembahasan RUU Kesehatan.

"Kami akan terus melakukan public hearing untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi temanteman sekaligus meluruskan substansi yang berkembang diluar yang sejatinya tidak seperti yang kami (Panja) bahas bersama pemerintah," katanya.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu mengatakan semua aspirasi yang selama ini ditampung Panja memiliki semangat sama untuk menghasilkan RUU Kesehatan yang dapat mengakomodasi kepentingan banyak pihak dari tenaga kesehatan maupun masyarakat.

"Apa yang disampaikan adik-adik hari ini, akan memperkaya bahan bagi kami (Panja) dan pemerintah untuk membahas undang-undang kesehatan. Kami menyambut baik aspirasi yang adik-adik sampaikan hari ini kami pastikan akan menjadi bahan tim Panja," katanya.

Dalam audiensi tersebut. Melki memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam RUU Kesehatan. Di mengatakan dalam UU Kesehatan yang ada saat ini, profesi dokter sangat rentan terhadap kekerasan maupun kriminalisasi dalam menjalankan praktik-sehari-hari.

"Kalau ada kejadian kekerasan, serahkan terlebih dahulu ke temanteman internal kesehatan. Ada berbagai majelis yang dipercaya untuk menegakkan disiplin etik, proses itu harus didahulukan sebelum masuk pada proses hukum." katanya.

Selain itu, terkait pemanfaatan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA). la mengatakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan pemanfaatan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri harus memenuhi standar kompetensi.

"RUU Kesehatan akan memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA bisa praktek dengan syarat memenuhi kompetensi. Kami akan tetap mengutamakan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI," katanya.

nm/aha





Kunjungan Parlemen Uni Eropa Ingin Adopsi Strategi Transportasi dan Pariwisata Pasca Covid-19



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy saat menerima kunjungan kehormatan dari Komite Transportasi dan Pariwisata Parlemen Uni Eropa

omisi X DPR RI menerima kuniungan kehormatan dari Delegasi Committee On Transport And Tourism Of The European Parliament atau Komite Transportasi dan Pariwisata Parlemen Uni Eropa pada Selasa (16/5). Dalam pertemuan tersebut, parlemen Uni Eropa memandang pariwisata Indonesia telah pulih kembali pasca pandemi Covid-19. Sehingga ingin mengadopsi strategi transportasi dan pariwisata di Indonesia yang dianggap sukses dalam meningkatkan devisa negara.

"Mereka mau bertukar pikiran dan bertukar informasi mengenai pengembangan pariwisata. Jadi

ternyata di Uni Eropa di wilayah mereka sektor pariwisata itu belum berkembang terlalu besar, artinya rebound-nya tidak seperti di Indonesia," kata Dede Yusuf dalam keterangan persnya, Rabu, (17/5).

Tambahnya, Indonesia telah dianggap memiliki rebound (pemulihan) cukup signifikan sehingga mereka ingin tahu polapola apa saja yang dilakukan. Dede pun menjelaskan, sektor pendukung kesuksesan pariwisata adalah infrastruktur penunjang yang memadai. Salah satunya adalah sarana transportasi, yang akan menunjang wisatawan berkunjung ke tempat atau destinasi wisata.

Parlemen Uni Eropa pun juga

memuji transportasi penerbangan Indonesia yang sudah menunjang lokasi-lokasi wisata di tanah air. Parlemen Uni Eropa memuji promosi wisata di Indonesia yang memikat maskapai-maskapai internasional untuk membuka rute penerbangan langsung ke lokasi tersebut. Lantaran masih banyak maskapai penerbangan internasional enggan membuka penerbangan langsung ke lokasi wisata yang ada di Eropa.

"Pertanyaan mereka adalah adanya rute-rute penerbangan yang saat ini juga kolaps dan tidak bisa menjangkau negara-negara terdekat dari pengunjung-pengunjung dari berbagai dunia. Termasuk mereka berpikir bagaimana hubungan penerbangan (maskapai) ke Indonesia, karena mereka sangat tahu dengan alam Indonesia dan destinasi di Indonesia yang bagus," sambung Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR juga menjelaskan salah satu strategi promosi pariwisata Indonesia lainnya yakni melalui pergelaran event-event internasional, seperti perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Tenggara di Labuan Bajo dan ANOC World Beach Games 2023 yang akan digelar di Bali Agustus mendatang. Menurut Dede, promosi yang luas ini dapat meningkatkan wisatawan ke Indonesia.

"Tentu kami katakan target kita adalah keseimbangan antara Wisnus (wisatawan nusantara atau lokal) dan Wisman (wisatawan mancanegara) sehingga tercapai target devisa negara dari berbagai sektor pariwisata," terangnya. **gal/rdn**

Pertumbuhan Ekonomi dan

Tekan inflasi di 2024



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat diwawancarai.

akil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus berupaya menekan inflasi di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

"Yang pertama kita memang harus tetap menjaga pertumbuhan

YANG PERTAMA KITA **MEMANG HARUS TETAP MENJAGA PERTUMBUHAN** DAN INFLASI. BAGAIMANAPUN PERCUMA JUGA KALAU PERTUMBUHAN TINGGI TETAPI INFLASI JUGA TINGGI. ITU YANG PERTAMA TENTUNYA KITA HARUS JAGA.

dan inflasi. Bagaimanapun percuma juga kalau pertumbuhan tinggi tetapi inflasi juga tinggi, itu yang pertama tentunya kita harus jaga," ungkap Amir saat ditemui **Parlementaria** di Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu memprediksi bahwa infrastruktur masih memiliki porsi besar dalam RAPBN 2024. Terlebih pembangunan infrastruktur dinilai mendukung pertumbuhan. Lebih iauh. Politisi Partai Persatuan Pembangunan juga menyinggung mengenai masa-masa pesta demokrasi yang akan digelar di awal tahun 2024. Menurutnya, penting untuk menjaga kondusifitas perekonomian di tengah tahun politik.

Dalam KEM-PPKF yang disampaikan Menteri Keuangan RI, disebutkan bahwa pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Adapun nilai pertumbuhan ekonomi yang diajukan berada pada rentang 5,3 persen hingga 5,7 persen dengan angka inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Amir menuturkan bahwa angka tersebut masih bersifat rancangan dan masih akan menjadi bahan pembicaraan pada rapat-rapat selanjutnya. DPR dijadwalkan akan kembali menggelar Rapat Paripurna pada tanggal 23 Mei 2023 mendatang dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi atas KEM-PPKF yang disampaikan pemerintah di hari ini.

uc.hfl/rdn





Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia & Papua Nugini Perkuat Kerja Sama Perdagangan & Investasi

adan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Papua Nugini dalam meningkatkan hubungan kerja sama, khususnya bidang perdagangan dan investasi. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, keria sama bilateral ini telah terbangun dengan baik sejak 1975.

Karena itu, pertemuan ini dilakukan dengan pendekatan soft diplomacy melalui pertunjukan kebudayaan dan cultural lunch yang digelar di Museum Rudana Bali. Perwakilan Parlemen Papua Nugini yang hadir diantaranya adalah Mr. Kala Aufa, Mr. Robert Masiboda, dan Mr. Christopher Aburu.

Fadli menjelaskan selain membahas kerja sama bilateral, acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi delegasi untuk mengapresiasi keindahan dan kekayaan budaya Bali melalui kunjungan ke Museum Rudana. Museum tersebut menampilkan koleksi seni dan budaya Indonesia yang kaya dan beragam.

"Pertemuan ini merupakan kesempatan yang berharga untuk memperkuat ikatan budaya antara Indonesia dan Papua Nugini. Melalui kerjasama yang erat dalam bidang seni, budaya, dan pariwisata, kita dapat memperkaya dan mempromosikan kekayaan



Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan bilateral

budaya kita kepada dunia," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu di Bali, Senin (22/5).

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana menambahkan pertemuan bilateral ini menjadi wadah penting bagi kedua negara untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terlebih dalam bidang seni dan budaya. "Kita dapat memperkuat kerjasama, dan memperluas peluang bisnis serta pertukaran budaya antara Indonesia dan Papua Nugini," jelas Politisi Partai Demokrat ini.

Putu menjelaskan dengan adanya pertemuan bilateral antara Indonesia

dan Papua Nugini ini diharapkan dapat memperkuat hubungan budaya dan diplomasi antara kedua negara. Melalui kerja sama yang erat dan pertukaran budaya yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta ikatan yang lebih kuat dan saling menguntungkan bagi masyarakat kedua negara.

Selain membahas kerjasama bilateral, acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi delegasi untuk mengapresiasi keindahan dan kekayaan budaya Bali melalui kunjungan ke Museum Rudana. Museum tersebut menampilkan koleksi seni dan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. 🗪 blf/rdn











Deputi Bidang Persidangan DPR RI Suprihartini dalam foto bersama usai mengisi rapat Briefing Keprotokolan di Serpong, Banten, Jumat (19/5/2023). FOTO: BALGGYS/NR





Suasana Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-115 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Komplek Gedung Parlemen (DPR, MPR dan DPD RI), Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023). FOTO: DEVI/NR



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat rapat koordinasi dengan seluruh pejabat tinggi madya dan pratama lingkungan Setjen DPR RI, dalam rangka persiapan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI terkait realisasi anggaran triwulan-I 2023 dan rencana kerja 2024 di Jakarta, Senin (22/05/2023). FOTO: RUNI/NR









